

RAPBN PERUBAHAN 2017

MEMACU LAJU EKONOMI

Dalam rangka menjaga pelaksanaan APBN tahun 2017 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan, penyesuaian atas berbagai besaran APBN diperlukan. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui kombinasi kebijakan fiskal seperti pelebaran defisit anggaran, efisiensi belanja negara, serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara, yang dihitung secara lebih realistis.

Prospek Perekonomian Global dan Domestik

Kondisi perekonomian global masih menunjukkan ketidakpastian

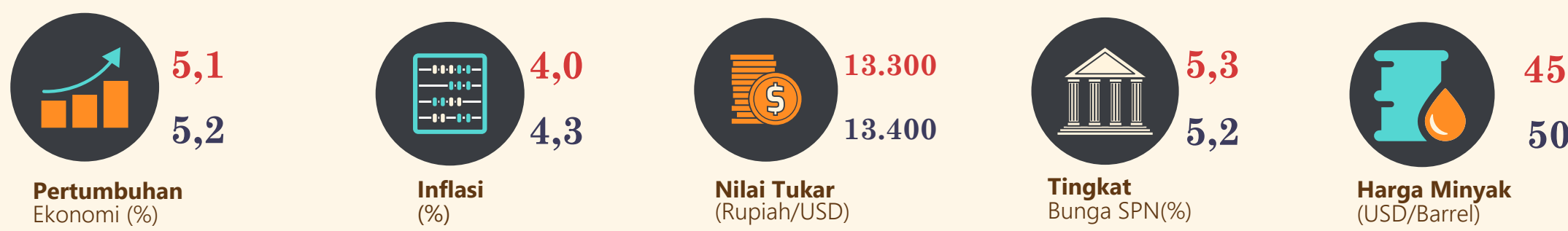
- Kenaikan the Fed Fund Rate (FFR)
- Kebijakan perdagangan AS dibawah Pemerintahan baru
- Keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok

Upaya Pemerintah agar ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi

- Peningkatan kinerja ekspor dan impor Indonesia sejak akhir tahun 2016
- Didorong oleh konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

● APBN 2017 ● RAPBNP 2017



Ringkasan Postur

| APBN (triliun Rupiah) | APBN 2017 | RAPBNP 2017 |
|--|----------------|----------------|
| A. PENDAPATAN NEGARA | 1.750,3 | 1.714,1 |
| I. PENDAPATAN DALAM NEGERI | 1.748,9 | 1.711,0 |
| 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.498,9 | 1.450,9 |
| 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | 250,0 | 260,1 |
| II. PENERIMAAN HIBAH | 1,4 | 3,1 |
| B. BELANJA NEGARA | 2.080,5 | 2.111,4 |
| I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 1.315,5 | 1.351,6 |
| 1. BELANJA K/L | 763,6 | 773,1 |
| 2. BELANJA NON K/L | 552,0 | 578,5 |
| II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA | 764,9 | 759,8 |
| 1. TRANSFER KE DAERAH | 704,9 | 699,8 |
| 2. DANA DESA | 60,0 | 60,0 |
| * ANGGARAN PENDIDIKAN | 416,1 | 422,3 |
| RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN THD BELANJA NEGARA (%) | 20,0 | 20,0 |
| * ANGGARAN KESEHATAN | 104,0 | 105,6 |
| RASIO ANGGARAN KESEHATAN THD BELANJA NEGARA (%) | 5,0 | 5,0 |
| C. KESEIMBANGAN PRIMER | (109,0) | (178,0) |
| D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN | (330,2) | (397,2) |
| % SURPLUS/ (DEFISIT) TERHADAP PDB | (2,41) | (2,92) |
| E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V) | 330,2 | 397,2 |
| I. PEMBIAYAAN UTANG | 384,7 | 461,3 |
| II. PEMBIAYAAN INVESTASI | (47,5) | (59,7) |
| III. PEMBERIAN PINJAMAN | (6,4) | (3,7) |
| IV. KEWAJIBAN PINJAMAN | (0,9) | (1,0) |
| V. PEMBIAYAAN LAINNYA | 0,3 | 0,3 |

RINGKASAN RAPBN PERUBAHAN 2017

- Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan merupakan perwujudan komitmen Pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- Diperkirakan pendapatan negara akan mengalami penurunan. Hal tersebut terutama akibat penurunan penerimaan perpajakan yang disebabkan perbaikan proyeksi penerimaan perpajakan dengan menggunakan basis realisasi tahun 2016. Namun dengan tingkat pertumbuhannya lebih baik dibanding tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya.
- PNBPN diperkirakan naik, yang bersumber dari sektor migas sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dan batubara, serta penguatan penerimaan hibah.
- Belanja negara diproyeksikan naik. Perubahan tersebut utamanya disebabkan oleh:
 - (1) kebijakan efisiensi belanja barang K/L;
 - (2) tambahan alokasi belanja, baik untuk kegiatan prioritas, mendesak, maupun kewajiban yang harus dilunasi;
 - (3) perubahan belanja yang bersumber dari perubahan pagu PNBPN/BLU dan rencana penarikan pinjaman hibah luar negeri;
 - (4) perubahan bunga utang, subsidi, dan dana bagi hasil akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro; dan
 - (5) penurunan DAU sejalan dengan penurunan PDN neto.
- Dengan memperhitungkan perubahan pendapatan negara dan belanja negara, maka defisit anggaran pada RAPBNP tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi **Rp397,2 triliun atau 2,92 persen** terhadap PDB.
- Besaran defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan anggaran, yang juga telah memperhitungkan kenaikan besaran pembiayaan investasi, antara lain untuk PMN pada PT. KAI, tambahan investasi pada LMAN, dan penguatan kelembagaan LPDP melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan.

Perubahan Kebijakan

● Bidang Perpajakan

- (1) optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* melalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program *tax amnesty*;
- (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat;
- (3) meningkatkan produktifitas dan daya saing industri domestik;
- (4) mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan;
- (5) penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota; dan
- (6) pemerataan penyelundupan.

● Bidang PNBPN

- (1) menahan turunnya *lifting* minyak dan gas serta efisiensi *cost recovery*;
- (2) penerapan *production sharing contract* (PSC) *gross split* pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang akan terminasi dan/atau melakukan perpanjangan kontrak kerja sama;
- (3) optimalisasi penerimaan royalti (kerja produksi) dari pertambangan mineral dan batubara;
- (4) penyempurnaan berbagai peraturan PNBPN, antara lain revisi Undang-Undang PNBPN dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBPN; dan
- (5) penerapan kebijakan *payout ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.

● Bidang Belanja Pemerintah Pusat

- (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi;
- (2) efisiensi belanja barang K/L untuk dialokasikan pada belanja/kegiatan yang produktif dan prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas belanja;
- (3) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas maupun untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah.

● Bidang Transfer ke Daerah & Dana Desa

- (1) perubahan besaran DAU sejalan dengan perubahan PDN Netto, sesuai kebijakan pagu DAU nasional tidak bersifat final;
- (2) penyaluran anggaran, terutama DAK Fisik dan Dana Desa setiap tahapannya berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output;
- (3) pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; serta
- (4) tambahan alokasi untuk kewajiban/kurang bayar beberapa komponen Transfer ke Daerah (DBH dan DAK Fisik).

● Bidang Pembiayaan Anggaran

- (1) mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) melalui alokasi PMN;
- (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional;
- (3) penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya; dan
- (4) mendukung penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

